
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE UAKPB 032.12.0200.403824.000.KD

LAPORAN SIMAK - BARANG MILIK NEGARA
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023



UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT RISET PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
Jalan Cilalawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat
Telepon/Faximile: (0264) 208768 Email: bp2ksi@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah salah satu entitas akuntansi Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara disertai Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data BMN dan Pmutakhiran Data BMN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

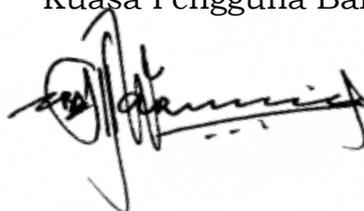
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013.

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara.
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
19. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
20. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK- BMN.
21. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-203/KN/KN.2/2022 hal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2022.

Penyusunan Laporan BMN ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan *good governance*. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Satua Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Purwakarta, 24 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang



Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Laporan Barang Milik Negara

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

- I Pendahuluan
- II Kebijakan Akuntansi
- III Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Lampiran :

- A Laporan Barang Milik Negara
 - Laporan Barang Milik Negara dalam Neraca
 - Laporan Barang Milik Negara Intrakomtabel
 - Laporan Barang Milik Negara Ekstrakomtabel
 - Laporan Barang Milik Negara Gab. Intarkomtabel & Ekstrakomtabel
 - Laporan Persediaan
 - Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna
 - Laporan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Laporan Barang Bersejarah
 - Laporan Barang Aset Tak Berwujud
 - Laporan Kondisi Barang
 - Data Transaksi Gabungan Intrakomtabel & Ekstrakomtabel
 - Register Transaksi Harian (RTH)
- B Lampiran-lampiran sebagai pendukung CaLBMN



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pada UAKPB Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Periode Tahunan

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap

siklus perbendaharaan.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana

telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri

Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015.

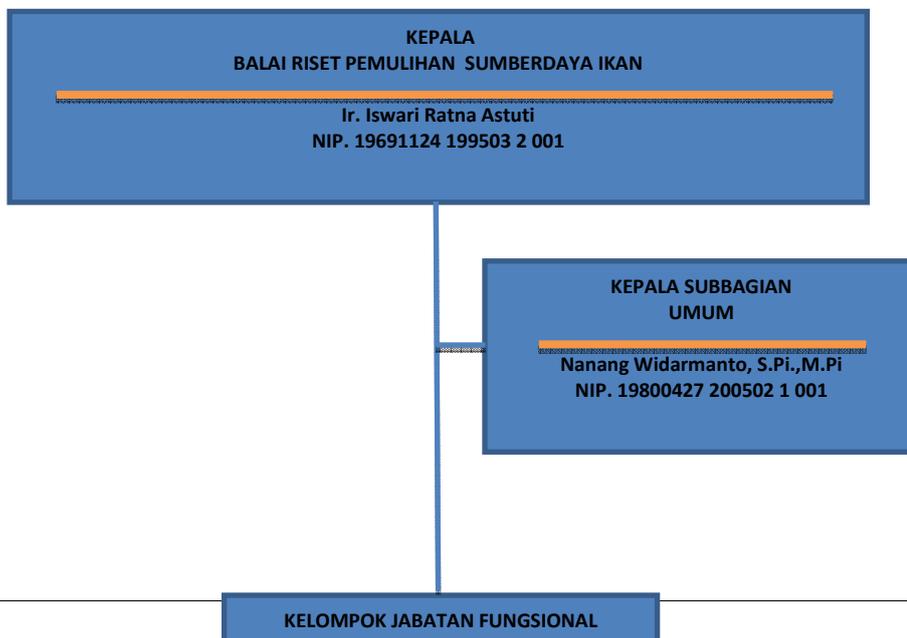
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013.
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
30. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
31. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN.
32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

34. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH).
35. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19.
37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
38. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-203/KN/KN.2/2022 hal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2022.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, dan pustakawan. Struktur organisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah sebagai berikut:



Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari **35** pegawai (jumlah pegawai). Adapun Tugas dan Fungsi dari **Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan** adalah sebagai berikut:

- identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya ikan,
- pemulihan sumber daya ikan,
- monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan

Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang

tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat;
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas;
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan SIMAK-Persediaan, yang digunakan pertama kali pada tahun 2008, hingga kini masih digunakan pada penyusunan LBP BMN KKP. Namun, Aplikasi yang semula digunakan pada setiap level unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB), kini hanya digunakan pada level UAKPB guna pencatatan transaksi-transaksi Barang Milik Negara, baik moneter maupun nonmoneter. Versi terakhir yang digunakan hingga periode pelaporan ini adalah SIMAK-BMN Versi 21.0 Referensi 21.0 dan Persediaan Versi 21.0

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.

6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

7. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbkn.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai *base data* online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon&LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Entitas pelaporan (UAPPB-E1), dan Uanit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas

penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program ‘Satu Data’ atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

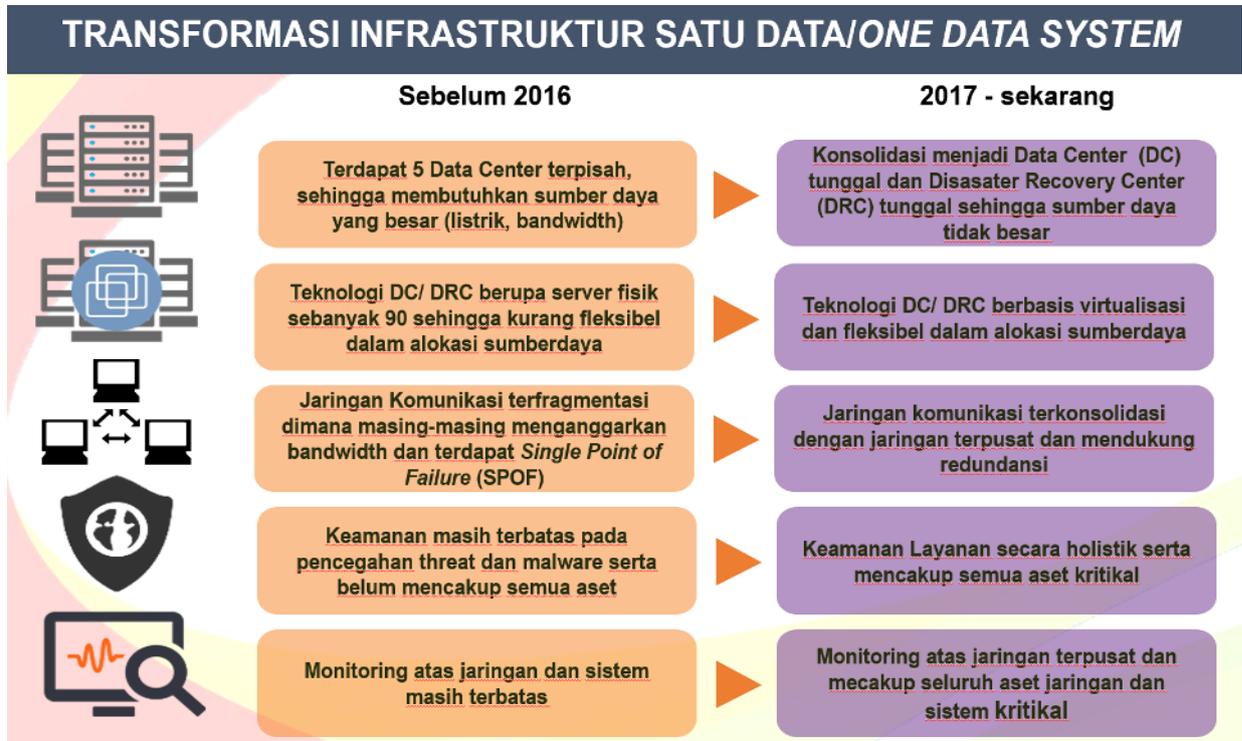
One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Entitas pelaporan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016.
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016.
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin.
- 4) Alih Status Sistem Informasi.
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi.
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi.
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin.

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

Gambar 3
Transformasi Infrastruktur One Data System

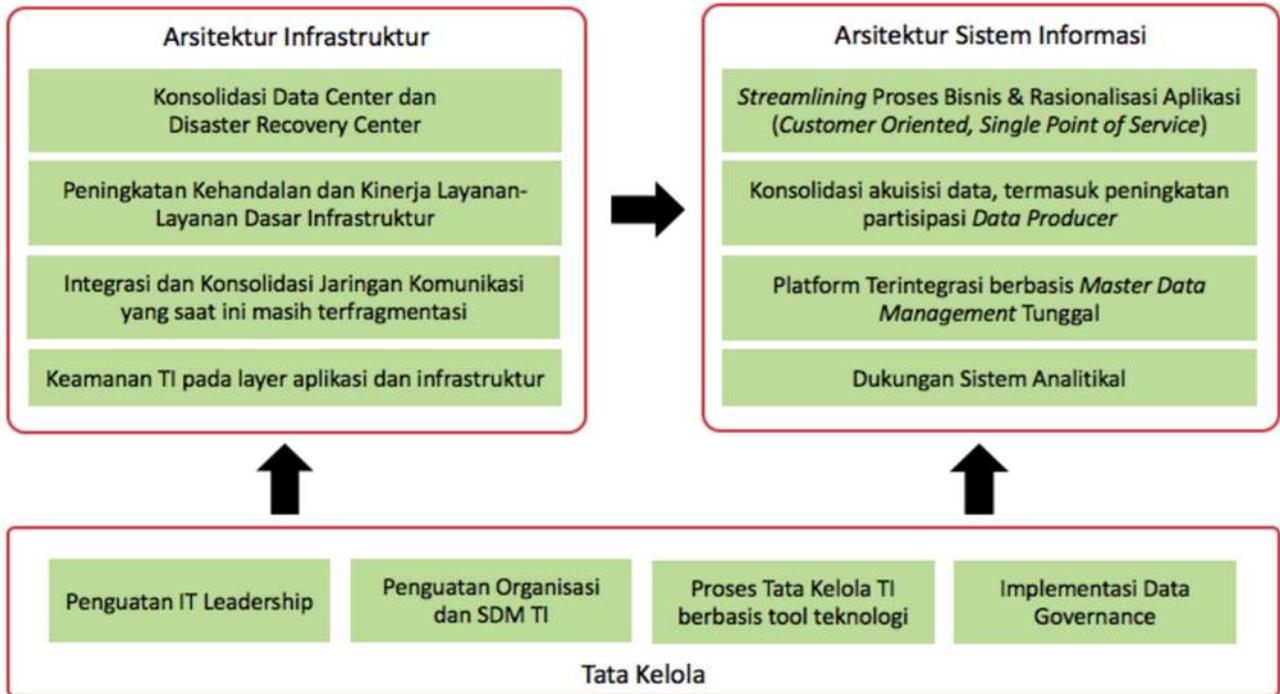


Gambar 4
Transformasi Aplikasi

KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA	TRANSFORMASI APLIKASI	
 - 2016 SEBELUM ONE DATA	2017 - ... SETELAH ONE DATA
• Master Data	Redundan/ Tidak Konsisten	Tunggal Dan Konsisten
• Basis Pengembangan Aplikasi	Struktur Organisasi	Siklus Fungsional
• Aplikasi Pendataan Produksi	Beberapa Aplikasi	satudata.kkp.go.id
• Jumlah aplikasi	295 Aplikasi	19 Aplikasi Utama
• Keamanan Aplikasi	Belum Terkelola Baik	Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
• Validasi Data Kependudukan	Manual	Validasi E-KTP Online melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI
• Dokumentasi arsitektur aplikasi	Tidak Ada	Terdokumentasi Dengan Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

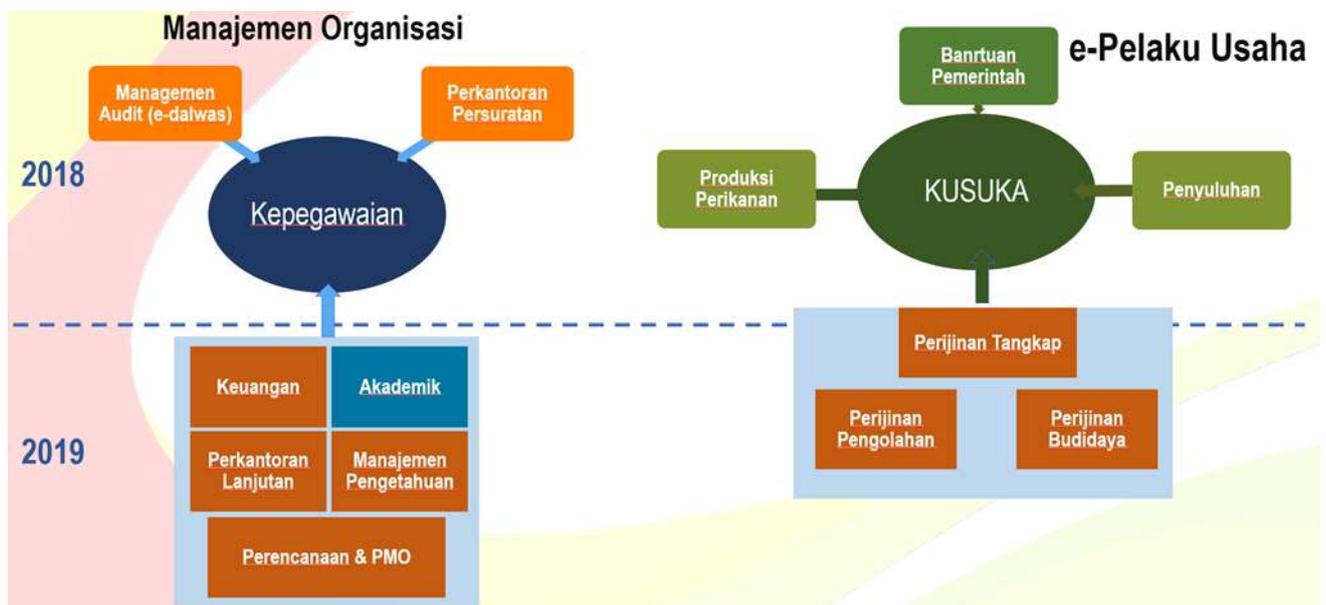
Gambar 5
Strategi Transformasi Teknologi Informasi



Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan.
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).

Gambar 6
Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 7
Capaian Program Satu Data/One Data System KKP



Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterdediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen

karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP periode Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP hingga 31 Desember 2023.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP ini adalah sebesar Rp25.393.902.640,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp25.471.196.140,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama tahun 2023 sebesar Rp193.927.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan nilai mutasi kurang sebesar Rp995.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna

mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar.
2. Daftar Isi.
3. Daftar Gambar.
4. Daftar Tabel.
5. Neraca Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, per tanggal 31 Desember 2023.
6. Laporan Barang Persediaan.
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub Kelompok Barang.
9. Laporan Aset Tak Berwujud.
10. Laporan Barang Bersejarah.
11. Laporan Kondisi Barang.
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
13. Laporan Barang Hilang.
14. Laporan Barang Rusak Berat.
15. Laporan Barang Hibah DK/TP.
16. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.
17. Catatan atas LBKP.
Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP per tanggal 31 Desember 2023, catatan ringkas mutasi BMN pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP periode Tahun Anggaran 2023.
18. Lampiran, yang terdiri dari: Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan menurut Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah sebesar Rp25.222.964.140,00 (Dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp25.194.794.140,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp28.170.000,00

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp25.393.902.640,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp25.204.472.140,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp189.430.500,00

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode berjalan, sebesar Rp(77.293.500,00) (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp(238.554.000,00) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp161.260.500,00

Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Perubahan nilai BMN Persediaan, BMN intrakomptabel, dan BMN ekstrakomptabel sebelum penyusutan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel A.1

**Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP**

Kode	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	41.500	148.500	(107.000)	0.28
Jumlah Aset Lancar		41.500	148.500	(107.000)	0.28
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				

Kode	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
1311	Tanah	8.962.232.000	8.962.232.000	0	0.00
1321	Peralatan dan Mesin	8.761.521.140	8.509.035.140	252.486.000	1.03
1331	Gedung dan Bangunan	5.940.954.000	5.913.537.000	27.417.000	1.00
1341	Jalanan Irigasi dan Jaringan	1.431.867.000	1.431.867.000	0	1.00
1351	Aset Tetap Lainnya	107.898.000	107.898.000	0	1.00
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0.00
Jumlah Aset Tetap		25.204.472.140	24.924.569.140	279.903.000	4.03
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak Berwujud	43.350.000	43.350.000	0	1.00
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	0	270.225.000	(270.225.000)	0.00
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0	0.00
Jumlah Aset Lainnya		43.350.000	313.575.000	(270.225.000)	1.00
TOTAL BMN INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN		25.247.863.640	25.238.292.640	9.571.000	5.31
BMN EKSTRAKOMPTABEL					

Kode	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
1313	Peralatan dan Mesin	180.954.500	19.694.000	161.260.500	9.19
1331	Gedung dan Bangunan	8.476.000	8.476.000	0	1.00
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	0	0	0	0.00
TOTAL BMN EKSTRAKOMPTABEL		189.430.500	28.170.000	161.260.500	10.19
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN		17.854.956.170	16.833.366.395	1.021.589.775	15.50

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2023

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.500,00 yang terdiri dari saldo awal Rp148.500,00 dan total mutasi selama Tahun 2023 (Rp107.000,00) Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Mutasi Persediaan di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP Tahun 2023, Per 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	148.500	(107.000)	41.500	0.28
117112	Amunisi	0	0	0	0.00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0.00
117114	Suku Cadang	0	0	0	0.00
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0	0.00

AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0	0.00
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0.00
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	0	0	0	0.00
117131	Bahan Baku	0	0	0	0.00
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	0.00
	Total	148.500	(107.000)	41.500	0.28

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama Tahun 2023, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

Tabel 1.2
Rincian Mutasi Persediaan Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan
Tahun 2023

Saldo Awal per 1 Januari 2023 (31 Desember 2022 Audited)	
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	0
M02 Pembelian	35.962.000
M03 Transfer Masuk	0
M04 Hibah Masuk	0
M06 Perolehan Lainnya	0
M07 Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian	(36.069.000)
K02 Tranfer Keluar	0
K03 Hibah Keluar	0

K04 Barang Usang	0
K05 Barang Rusak	0
K07 Penghapusan Lainnya	0
K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	0
K10 Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Tambah	0
K99 Koreksi Kurang	0
Saldo Akhir	(107.000)

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2023 merupakan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*), senilai Rp148.500,00 hasil stock opname persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Saldo Awal Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan KKP Tahun 2023
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

AKUN	URAIAN AKUN	Nilai
117111	Barang Konsumsi	148.500
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Total		148.500

2) Mutasi Persediaan Tahunan Tahun 2023

Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp41.500,00 diperoleh dari pengurangan saldo awal senilai Rp148.500,00 dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – Desember 2023.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. **Mutasi Kurang (2.2)** pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. **Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3)** merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **Stock Opname (2.4)** persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2023.

Nilai persediaan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mengalami penurunan senilai Rp(107.000,00). Nilai penurunan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp35.962.000,00 mutasi kurang senilai Rp36.069.000,00 dan penyesuaian berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2023 senilai Rp41.500,00

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebesar Rp35.962.000,00 terdiri atas transaksi pembelian (M02) barang konsumsi dan bahan persediaan lainnya.

(a) M01 – Penambahan Saldo Awal

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi penambahan saldo awal selama periode pelaporan Tahunan Tahun 2023.

(b) M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode pelaporan tahun 2023 senilai Rp35.722.000,00 merupakan pembelian barang konsumsi dan Rp240.000,00 yang merupakan pembelian barang persediaan lainnya.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 2.2
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	1.357	35.722.000
117112	Amunisi	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
117114	Suku Cadang	0	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	0	0
117131	Bahan Baku	0	0
117199	Persediaan Lainnya	2	240.000

(c) M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi TM-TK selama periode pelaporan Tahunan Tahun 2023. **TM-TK** merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi / satker dalam satu eselon I maupun antar eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya.

(d) M04 - Hibah Masuk

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Hibah Masuk selama periode Tahunan Tahun 2023.

(e) M06 – Perolehan Lainnya

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi perolehan

lainnya selama periode Tahunan Tahun 2023.

(f) M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Saldo Reklas Masuk pada periode Tahunan Tahun 2023.

(g) M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat Transaksi Koreksi Tambah (M99) dan Koreksi Kurang (K99). Transaksi Koreksi Tambah (M99) dan Koreksi Kurang (K99) merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas maupun nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya.

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10, K99)

(a) K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp(36.069.000,00) merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa barang konsumsi dan persediaan lainnya.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 2.8
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Balai Riset pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-1.351	(35.829.000)
117112	Amunisi	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
117114	Suku Cadang	0	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0

117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	0	0
117131	Bahan Baku	0	0
117199	Persediaan Lainnya	-2	(240.000)

(b) K03 – Hibah Keluar

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Hibah Keluar selama periode Tahunan Tahun 2023.

(c) K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode Tahunan Tahun 2023.

(d) K06 – Penghapusan Lainnya

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Penghapusan Lainnya selama periode Tahunan Tahun 2023.

(e) K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode Tahunan Tahun 2023.

(f) K09 – Penyerahan kepada Masyarakat

Satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat transaksi Penyerahan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah selama periode Tahunan Tahun 2023.

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp41.500,00 merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan transaksi keluar/masuk selama periode Tahunan Tahun 2023. Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumis	13	41.500
117112	Amunisi	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
117114	Suku Cadang	0	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	0	0
117131	Bahan Baku	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0

IV. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 31 Desember 2023 (periode pelaporan). Hasil Opname Fisik senilai Rp41.500,00 Berdasarkan Hasil Opname Fisik tidak terdapat akun yang mempengaruhi saldo persediaan per 31 Desember 2023 (periode pelaporan).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.962.232.000,00 Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 3.988 m2 dengan nilai sebesar Rp8.962.232.000,00

Per 31 Desember 2023 satker Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 2.263 m2 senilai Rp5.085.640.000,00 (Sertifikat No.10070709400001)
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 1.725 m2 senilai Rp3.876.592.000,00 (Sertifikat No. 10070709400002)

Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tanah Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	3.988	8.962.232.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.942.475.640,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp8.749.544.140,00 mutasi tambah sebesar Rp193.927.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp995.500,00

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	8.729.850.140	19.694.000
Mutasi Tambah	31.671.000	162.256.000
Mutasi Kurang	0	995.500
Saldo Akhir	8.761.521.140	180.954.500

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp850.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00

Alat Bantu per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai Rp850.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomptabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor 027/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Bantu
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Wall Microphone Voice Recorder	0	850.000

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Bantu Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	850.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.290.219.000,00

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.290.219.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 11 unit dengan nilai sebesar Rp1.290.219.000,00

Alat Angkutan per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11	1.290.219.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.290.219.000,00

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp145.744.115,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar Rp142.823.115,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 3 unit dengan nilai Rp.2.921.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Surat Pesanan Nomor 032/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebanyak 2 unit dengan nilai Rp1.925.000,00 dan disebabkan adanya reklasifikasi masuk sebanyak 1 unit dengan nilai Rp995.500,00 Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan kode barang, berupa:

Nilai Perolehan	Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk
995.500	Alat Pemotong Kertas	Gergaji Chain Saw

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas:

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mesin bor	0	950.000
Mesin gerinda	0	975.500

Dari jumlah/nilai di atas, tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	145.744.115
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023

adalah sebesar Rp118.167.985,00

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.252.672.048,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 583 unit dengan nilai Rp1.131.273.465,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga per tanggal 31 Desember 2023 terdapat mutasi tambah sebanyak 140 unit dengan nilai sebesar Rp122.393.500,00 dan terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp995.500,00

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Surat Pesanan Nomor 032/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan belanja barang ekstrakomtabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor 027/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 serta SPK dengan Nomor 016/BRSDM-BRPSDI/PL.420/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Dan juga mutasi tambah disebabkan adanya transfer masuk dari Pusat Riset Perikanan dengan BAST Nomor B.2639/BRSDM.3/PL.750/XI/2023 tanggal 7 November 2023, yang berupa 1 unit Sice dengan nilai sebesar Rp9.000.000,00

Sedangkan mutasi kurang disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar, berupa:

Nilai Perolehan	Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk
995.500	Alat Pemotong Kertas	Gergaji Chain Saw

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat pemotong kertas	0	995.500
LCD projector/infocus	0	1.991.000
Meja kerja kayu	0	22.560.000
Kursi besi/metal	0	61.600.000
Kursi kayu	0	3.000.000
Sice	0	5.940.000
Meja rapat	0	3.980.000
Meja resepsionis	0	1.800.000
Meja makan kayu	0	5.700.000
Mesin penghisap debu/vacuum claner	0	800.000
Mesin pemotong rumput	0	995.000
Amplifier	0	992.000
Loudspeaker	0	990.000
Coffee maker	0	750.000
Kabel	0	1.300.000

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	722	1.252.672.048
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.194.926.320,00

e. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp228.512.600,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 21 unit dengan nilai sebesar Rp205.040.600,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp23.472.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Surat Pesanan Nomor 032/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan belanja barang ekstrakomtabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor 027/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Microphone/Wireless MIC	0	7.600.000
Uninterruptible ower Supply (UPS)	0	3.900.000
Analog/Digital Receiver	0	1.500.000

Mixer Sound Sistem	0	950.000
Camera Electronic	0	5.400.000
Power Supply(Peralatan Studio Video dan Film)	0	700.000
Audio Converter	0	1.971.000
Telepon Lapangan	0	1.451.000

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

**Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023**

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	48	228.512.600
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp205.040.600,00

f. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.347.575.080,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 211 unit dengan nilai sebesar Rp5.342.365.080,00

Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 6 unit dengan nilai Rp5.210.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Surat Pesanan Nomor 032/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan belanja barang ekstrakomtabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor 027/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Laboratorium
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
Stabilizer	0	3.960.000
Kompor LPG	0	500.000
Tang Ampere	0	750.000

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	217	5.347.575.080
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.491.340.996,00

g. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.222.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 7 unit dengan nilai sebesar Rp48.822.000,00

Alat Persenjataan per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai Rp3.400.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor 027/BRSDM-

BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Alat Persenjataan
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
TEA Tile II Headset, With PTT	0	3.400.000

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11	52.222.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.822.000,00

h. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp433.484.220,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 56 unit dengan nilai sebesar Rp36.676.000,00

Komputer per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdapat mutasi tambah sebanyak 20 unit dengan nilai sebesar Rp36.676.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi tambah tersebut disebabkan adanya belanja barang ekstrakomtabel Alat Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Surat Pesanan Nomor 032/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan belanja barang ekstrakomtabel Alat dan Bahan Penunjang Multimedia dengan Surat Pesanan Nomor

027/BRSDM-BRPSDI/PL.420/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023. Dan juga karena adanya transfer masuk dari Pusat Riset Perikanan dengan BAST Nomor B.2639/BRSDM.3/PL.750/XI/2023 tanggal 7 November 2023 berupa:3 unit P C. Unit dengan nilai sebesar Rp22.671.000,00

Mutas tambah belanja barang ekstrakomtabel, terdiri atas

Tabel 3.3
Mutasi Tambah Komputer
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
External/Portable Hardisk	0	4.780.000
Modem	0	1.850.000
Kabel UTP	0	975.000
CCTV Camera, 12V	0	6.400.000

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komputer Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	76	421.140.220
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Komputer pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp385.792.925,00

i. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp112.662.660,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai sebesar Rp112.662.660,00

Alat eksplorasi meliputi:

Uraian Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan
Range Finder (ukur/instrument)	1	10.450.000
Mounting Kamera	3	102.212.660

Alat Eksplorasi per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Eksplorasi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	112.662.660
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.153.798,00

j. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.530.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai sebesar Rp77.530.000,00

Alat keselamatan kerja meliputi:

Uraian Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan
Under water light	1	43.000.000
Fingerprint kits	2	25,400.000
Tas, peralatan (oceania)	1	9.130.000

Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Keselamatan Kerja Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	77.530.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.530.000,00

k. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.000.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00

Peralatan Proses/Produksi meliputi:

Uraian Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan
Shredder	1	2.000.000

Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Peralatan Proses/Produksi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	2.000.000

Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.000.000,00

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.949.430.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 25 Unit dengan nilai sebesar Rp5.949.430.000,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.463.068.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 24 Unit dengan nilai sebesar Rp5.463.068.000,00

Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	3.923.543.000
Rusak Ringan	18	1.539.525.000
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp641.008.721,00

b. Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp486.362.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp486.362.000,00

Tugu/Tanda Batas meliputi:

Uraian Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan
Pagar permanen	1	486.362.000

Tugu/Tanda Batas per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Tugu/Tanda Batas berupa pagar permanen yang terletak di Kompleks Perumahan Dinas Jalan Ipik Gandamana RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat.

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tugu/Tanda Batas Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	486.362.000
Rusak Ringan	--	--
Rusak Berat	--	--

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp59.152.133,00

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.431.867.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp1.431.867.000,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.470.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 913 m2 dengan nilai sebesar Rp98.470.000,00

Jalan dan Jembatan meliputi:

Uraian Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan
Jalan khusus kompleks	913	98.470.000

Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	913	98.470.000
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.470.000,00

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp107.898.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp107.898.000,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	107.898.000	0
Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir	107.898.000	0

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp107.898.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 65 unit dengan nilai sebesar Rp107.898.000,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Rincian Bahan Perpustakaan per Kode Barang
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
6.01.01.01.999	Buku lainnya	63	107.898.000

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Bahan Perpustakaan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	63	107.898.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp270.225.000,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai Rp270.225.000,00

Mutasi kurang disebabkan adanya penghapusan BMN dari neraca dengan SK Penghapusan No. 98/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang berupa survey boat.

Rincian Mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1
Rincian Mutasi Aset Lainnya Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	270.225.000	0
Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang	270.225.000	0
Saldo Akhir	0	0

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 tidak terdapat Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.350.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp43.350.000,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan antara lain:

Tabel 8.5
Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162141	Paten	5	6.950.000
162151	Software	2	36.400.000
Grand Total		7	43.350.000

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.350.000,00

c. BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp270.225.000,00

BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak terdapat mutasi tambah dan terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp270.225.000,00 yang berupa survey boat dan sudah dilakukan penghapusan BMN dari neraca dengan SK Penghapusan No. 98/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 22 Februari 2023.

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00

C. Barang Milik Negara pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.247.863.640,00 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Nilai BMN Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	41.500	0.28			41.500	0.28
	Sub Jumlah (I)	41.500	0.28			41.500	0.28
II	Aset Tetap						
1	Tanah	8.962.232.000	0.00			8.962.232.000	0.00
2	Peralatan dan Mesin	8.761.521.140	1.03	180.954.500	9.19	8.942.475.640	10.21
3	Gedung dan Bangunan	5.940.954.000	1.00	8.476.000	1.00	5.949.430.000	2.00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.431.867.000	1.00	0	0.00	1.431.867.000	1.00
5	Aset Tetap Lainnya	107.898.000	1.00	0	0.00	107.898.000	1.00
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Sub Jumlah (II)	25.204.472.140	4.03	189.430.500	10.19	25.393.902.640	14.21
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Aset Tak Berwujud	43.350.000	1.00	0		43.350.000	1.00
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Sub Jumlah (III)	43.350.000	1.00	0	0.00	43.350.000	1.00
	Total	25.247.863.640		189.430.500		25.437.294.140	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel C.2
Nilai BMN Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
2	Peralatan dan Mesin	7.864.299.624		19.694.000		7.883.993.624	
3	Gedung dan Bangunan	700.160.854		1.102.108		701.262.962	
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	981.915.813		0		981.915.813	
5	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Sub Jumlah (I)	9.546.376.291		20.796.108		9.567.172.399	
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	43.350.000		0		43.350.000	
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0		0		0	
	Sub Jumlah (II)	575.079.250		20.796.108		575.079.250	
	Total	10.121.455.541		20.796.108		10.142.251.649	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel C.3
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	41.500	41.500	0
2	Tanah	8.962.232.000	8.962.232.000	0
3	Peralatan dan Mesin	8.761.521.140	8.761.521.140	0
4	Gedung dan Bangunan	5.940.954.000	5.940.954.000	0
5	Jalan dan Jembatan	98.470.000	98.470.000	0
6	Irigasi	772.612.000	772.612.000	0

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
7	Jaringan	560.785.000	560.785.000	0
8	Aset Tetap Renovasi	0	0	0
9	Aset Tetap Lainnya	107.898.000	107.898.000	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.864.299.624	7.864.299.624	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	700.160.854	700.160.854	0
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	98.470.000	98.470.000	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	772.612.000	772.612.000	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	110.833.813	110.833.813	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
18	Hak Cipta	0	0	0
19	Paten	6.950.000	6.950.000	0
20	Software	36.400.000	36.400.000	0
21	Lisensi	0	0	0
22	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
23	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
24	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
26	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
27	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0
29	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
30	Akumulasi Amortisasi Paten	2.732.500	2.732.500	0
31	Akumulasi Amortisasi Software	36.400.000	36.400.000	0
32	Akumulasi Amortisasi	0	0	0

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
	Lisensi			
33	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0	0
Total		11.894.875.928	11.894.875.928	0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel IX.1
Perkembangan Nilai BMN Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Tahun 2019-2023 (5 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	27.173.374.260	(1.271.744.357)	95,52
2	2020	26.797.222.370	(376.151.890)	98,61
3	2021	25.934.185.395	(863.036.975)	96,77
4	2022	25.222.964.140	(711.221.255)	97,26
5	2023	25.393.902.640	170.938.500	1,01

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IX.2
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	8.962.232.000	0
2	Peralatan dan Mesin	8.884.799.640	57.676.000
3	Gedung dan Bangunan	5.949.430.000	0

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.431.867.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	107.898.000	0
6	Aset Tak Berwujud	43.350.000	0
TOTAL		25.379.576.640	57.676.000

Nilai BMN yang belum Ditetapkan Status Penggunaannya senilai Rp57.676.000,00 telah diajukan ke BPPSDM KP dengan Nomor Tiket PY77GA2 tanggal 12 Januari 2024.

b. Pengelolaan BMN

Tabel IX.3
Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	57.676.000				
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna					
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
8	Selesai serah terima					
TOTAL						

c. Pengelolaan BMN Idle (diisi jika memiliki BMN Idle)

Tabel IX.4
Ringkasan Pengelolaan BMN Idle Pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	2 unit
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 terdapat 2 unit Rumah Negara Golongan II terindikasi idle, yaitu 1 unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen NUP.4 dan 1 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen NUP. 5.

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

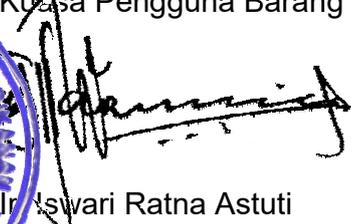
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah tidak terdapat usulan penghapusan barang rusak berat.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 tidak terdapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penanggungjawab
Kuasasa Pengguna Barang




Ineswari Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001